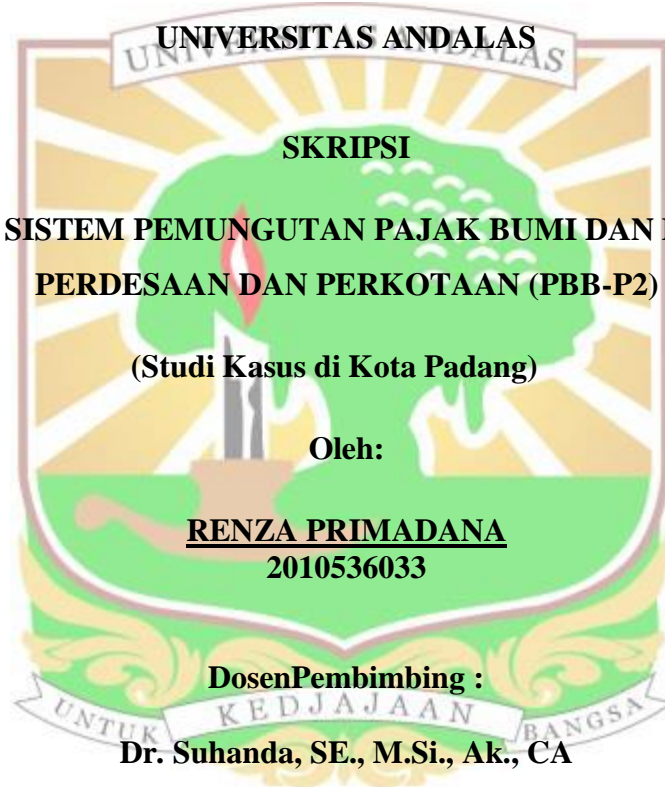




**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI INTAKE III  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**



**SKRIPSI**  
**ANALISIS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**  
**PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)**  
**(Studi Kasus di Kota Padang)**

**Oleh:**

**RENZA PRIMADANA**  
**2010536033**

**Dosen Pembimbing :**  
**Dr. Suhanda, SE., M.Si., Ak., CA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Akuntansi*

**PADANG**

**2023**



No Alumni  
Universitas:

**Renza  
Primadana**

No Alumni  
Fakultas:

**BIODATA :**

a) Tempat/Tgl Lahir: Padang/ 01 Agustus 1999, b) Nama Orang Tua: Anismal dan Gusri Yenti, c) Fakultas: Ekonomi dan Bisnis, d) Departemen: S1 Akuntansi Intake DIII, e) NIM: 2010536033 f) Tanggal Lulus: 10 Januari 2023, g) Predikat lulus: Sangat Memuaskan, h) IPK: 3,73 i) Lama Studi: 2 Tahun 5 Bulan, j) Alamat Orang Tua: Komplek Bumi Minang II Blok A.2, Kota Padang.

**ANALISIS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**(Studi Kasus Di Kota Padang)**

Skripsi Oleh : Renza Primadana

Pembimbing :

**Dr. Suhanda, S.E., M.Si., Ak., CA**

**ABSTRACT**

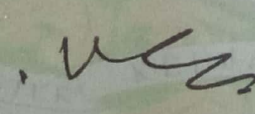
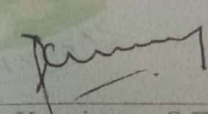
*The study aims to analyze and find out how the PBB-P2 collection system in Padang City is. As well as to find out what obstacles occurred when collecting PBB-P2 in Padang City. Also to see whether the PBB-P2 collection system implemented by the Padang City BAPENDA is by the existing procedures. The method used in this research is descriptive. The data used in this study are primary in the form of interviews, and secondary data in the form of data on the realization of PBB-P2 revenue and the System Operating Procedures (SOP) for PBB-P2 collection that apply to the Padang City Regional Revenue Agency. The results showed that the PBB-P2 collection system The P2 carried out by the Padang City BAPENDA includes registration, data collection, determination, assessment, and billing activities. The implementation of PBB-P2 collection activities only refers to the Mayor of Padang Regulation Number 4 of 2013 concerning Guidelines for the Implementation of Rural and Urban Land and Building Tax Collection. Overall, the implementation of the PBB-P2 collection in Padang City has been going quite well and has followed the existing procedures. Although, there are still obstacles when collecting PBB-P2, such as one taxpayer getting multiple SPPTs and the existence of a tax object whose existence is unknown or whose owner is unknown, as well as a system that has not been updated. Also the lack of public awareness to register and self-report Tax Objects that are controlled, owned, and utilized. This is what has made the realization of PBB-P2 revenue in Padang City not yet reach the target and there are still arrears of PBB-P2 every year.*

**Keywords:** *Collection System, Land and Building Tax Rural and Urban.*

## ABSTRAK

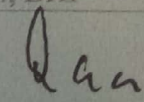
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pemungutan PBB-P2 di Kota Padang. Serta untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang terjadi pada saat pemungutan PBB-P2 di Kota Padang. Serta untuk melihat apakah sistem pemungutan PBB-P2 yang diterapkan oleh BAPENDA Kota Padang sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa wawancara, dan data sekunder berupa data realisasi penerimaan PBB-P2 dan *System Operating Procedure* (SOP) pemungutan PBB-P2 yang berlaku pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemungutan PBB-P2 yang dilaksanakan oleh BAPENDA Kota Padang meliputi kegiatan pendaftaran, pendataan, penetapan, penilaian dan penagihan. Pelaksanaan kegiatan pemungutan PBB-P2 ini hanya mengacu kepada Peraturan Walikota Padang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Secara keseluruhan, pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kota Padang sudah berjalan dengan cukup baik dan sudah mengikuti prosedur yang ada. Meskipun, masih terdapat kendala saat pemungutan PBB-P2, seperti adanya satu wajib pajak yang mendapatkan SPPT ganda dan adanya objek pajak yang tidak diketahui keberadaannya atau tidak diketahui pemiliknya, serta sistem yang belum diperbarui. Serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan dan melaporkan sendiri Objek Pajak yang dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkannya. Hal inilah yang membuat realisasi penerimaan PBB-P2 di Kota Padang belum mencapai target dan masih terdapat tunggakan PBB-P2 setiap tahunnya.

Skripsi ini telah dipertahankan melalui seminar hasil dan dinyatakan LULUS tanggal 07 Desember 2022. Abstrak ini telah disetujui oleh pembimbing dan penguji:

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Dr. Suhanda, S.E., M.Si., Ak., CA	Rahmat Kurniawan S.E., MA., Ak., CA., CPAI, BKP

Mengetahui:  
Ketua Program Studi  
S-1 Akuntansi Intake DIII

Firdaus, SE., M.Si., Ak  
NIP. 197507272001121004

  
Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas dan telah mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan